

Aplikasi Si Duli Demi Membasmi Pungli

written by Kabar 6 | 13 Juni 2024



Kabar6-Pemberantasan pungutan liar atau pungli menjadi salah satu program instansi penegak hukum di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam.

Praktik lancung yang menguras uang rakyat tersebut memang harus dibasmi lantaran masih ditemui di berbagai tingkatan instansi, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Dampaknya, pelayanan kepada masyarakat pun makin terhambat dan mahal, sedangkan di sisi sama, kepercayaan publik terhadap Pemerintah kian merosot.

Pungli, yang kadang dianggap sebagai pelicin urusan di beberapa instansi Pemerintah, masih ada karena rasuah ini seakan dianggap lumrah.

****Baca Juga:** [Menkominfo: Pengesahan Satgas Judi Online Tunggu Tanda Tangan Presiden](#)

Fenomena itulah yang mendorong Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pungli yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam tahun 2016.

Satgas tersebut terdapat unsur Polri, Kejaksaan, hingga seluruh pengawas inspektorat instansi kementerian dan pemerintah daerah di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia.

Namun demikian, pembentukan satgas tersebut tampaknya belum cukup sehingga Pemerintah masih membutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawasi adanya pungli di birokrasi.

Mengingat urgensi pemberantasan pungli, Pemerintah membuat aplikasi pengaduan yang diberi nama Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR)

Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa melaporkan secara langsung adanya pungli sehingga penindakan pun bisa dilakukan dengan cepat.

Pada 2023, tercatat ada 1,5 juta laporan dari masyarakat tentang praktik pungli yang masuk lewat aplikasi SP4N-LAPOR. Besarnya angka pelaporan tersebut menandakan tingginya minat masyarakat dengan aplikasi ini.

Sebelumnya, Kemenko Polhukam juga merilis data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023.

Pada 2022, IPAK Indonesia berada di angka 3,93 persen, namun pada tahun 2023, angka itu turun menjadi 2,92 persen.

Melihat fenomena ini, Satgas Pungli menyadari ada yang harus diperbaiki dalam proses pelayanan pengaduan dan penanganan kasus.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, satgas pun meningkatkan atau meng-upgrade aplikasi SP4N LAPOR menjadi sistem Aplikasi Pengaduan Pungli atau disebut Si DULI.

Aplikasi yang diluncurkan pada 13 Juni lalu itu dinilai memiliki beragam kelebihan pada kecepatan sistem penerima laporan dan kemudahan dalam mengakses dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya.

ANTARA pun sempat mencoba mengakses aplikasi tersebut. Bagi masyarakat yang ingin masuk ke dalam aplikasi Si DULI, warga harus mengunggah aplikasi SP4N terlebih dahulu di Playstore.

Sejak aplikasi itu diluncurkan sampai dengan hari ini, aplikasi tersebut sudah menerima 39 laporan dari masyarakat tentang praktik pungli yang terjadi di sejumlah instansi layanan publik.

Tentu saja pihak satgas berharap hal tersebut menjadi awal yang baik untuk memancing masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, cepat, dan akuntabel, seluruh pelayanan publik harus terbebas dari praktik suap. Apa pun alasannya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI) saat ditemui di Jakarta Pusat menjelaskan penindakan pelaku pungli melalui aplikasi tersebut dipastikan akan berlangsung cepat.

Laporan yang masuk ke aplikasi akan diterima oleh satgas, kemudian akan diverifikasi dengan bukti-bukti yang juga dikirim oleh warga melalui aplikasi tersebut.

Setelah itu, laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh satgas dengan mendatangi lokasi terjadinya pungli hingga memberikan sanksi kepada pegawai yang terbukti menerima suap.

Satgas menjamin keamanan jati diri pelapor sehingga publik

diminta tidak ragu atau gentar untuk melaporkan praktik pungli.

Pada saat yang sama, Kepala Satgas Pungli Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Dofiri menjelaskan fungsi lain dari aplikasi Si DULI bukan hanya sebatas membantu masyarakat melaporkan saja.

Aplikasi Si DULI juga bisa digunakan untuk mencegah praktik pungli dari hulu hingga hilir.

Hal tersebut dilakukan dengan cara mendata jumlah kasus pungli yang diterimanya satgas melalui aplikasi tersebut. Dari total jumlah kasus, satgas akan memetakan instansi atau kementerian serta lembaga mana yang paling banyak dilaporkan karena kasus pungli.

Selain itu, Pemerintah melalui aplikasi Si DULI juga dapat menganalisis modus operasi oknum dalam melakukan pungli tersebut. Dengan bekal informasi itu, Pemerintah dapat melakukan mitigasi pungli sejak dini sehingga tidak perlu harus menunggu munculnya korban pungli.

Selain itu, keberadaan Si DULI juga diharapkan bisa menjadi perangsang bagi seluruh kementerian dan instansi pemerintah lain dalam menerapkan konsep pelayanan berbasis digital.

Konsep tersebut harus diterapkan guna menggeser kebiasaan pelayanan manual bertatap muka yang dapat membuat celah terjadinya pungli.

Tidak hanya itu, aplikasi Si DULI juga menerapkan konsep transparansi dalam proses penanganan dan penindakan pungli. Tidak hanya kepada masyarakat, konsep transparansi ini juga berlaku kepada internal satgas.

Dengan demikian, Pemerintah bisa memetakan satgas mana yang paling banyak menuntaskan laporan pungli. Hal tersebut akan menjadi pendorong untuk para satgas yang bertugas dalam melayani masyarakat.

Dengan hadirnya aplikasi ini, jajaran satgas menaruh harapan besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam penindakan pungli.

Aplikasi ini diharapkan bisa menjadi senjata masyarakat untuk melawan praktik pungli di instansi pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.(ANTARA)

Artikel ini merupakan kerjasama diseminasi LKBN Antara dengan Kabar6.com

Binus dan Diskominfo Kota Tangerang Siapkan Aplikasi Pengelolaan Sampah Berbasis Geospasial

written by Kabar 6 | 13 Juni 2024



Kabar6-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Bina Nusantara University (Binus) School of Computer Science merancang sebuah aplikasi pengelolaan sampah berbasis geospasial.

Dosen Research Interest Group GeoEco-AI Binus, Fabian Surya Pramudya mengatakan aplikasi tersebut dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah dan analisis geospasial. Implementasi juga dapat menggunakan Artificial Intelligence (AI) apabila dibutuhkan.

****Baca Juga:** [Pemkot Tangerang Bantu Pemulihan Traumatis ART Lompat dari Lantai 3](#)

“Progres saat ini sudah 50 persen dan kami terus menyempurnakan Geo Bee ini dan selanjutnya kami buat lebih spesifik kepada pengelolaan sampah secara geospasial. Lalu, kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat,” katanya dilansir Antara Sabtu (1/6/2024).

Ia berharap dengan adanya Geo Bee ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya di Kota Tangerang. Sehingga, bank-bank sampah di Kota Tangerang dapat beroperasi secara optimal

dan mengurangi penumpukan sampah.

“Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Tangerang dan digunakan semaksimal mungkin. Sehingga, pengelolaan sampah semakin baik, tidak ada penumpukan sampah dan bank sampah dapat beroperasi secara optimal,” kata dia.

Kepala Diskominfo Kota Tangerang Indri Astuti mengatakan aplikasi tersebut bernama Geo Bee Dashboard yang berdasarkan hasil riset dan kajian.

“Nantinya aplikasi ini bisa digunakan dalam pengelolaan sampah berbasis geospasial untuk kepentingan publik dari hasil kolaborasi ini,” kata Indri.

Indri menambahkan Diskominfo juga memberikan kesempatan kepada Binus untuk melakukan riset lanjutan sebelum nantinya bisa dikolaborasikan bersama Dinas Lingkungan Hidup.

“Mereka akan melakukan riset lanjutan dan kami akan pertemukan juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang,” ujarnya. (red)

Menkumham: PRISMA 2.0 Perbaikan dan Pembaruan Aplikasi Bisnis dan HAM

written by Kabar 6 | 13 Juni 2024



Kabar6-Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan aplikasi PRISMA (Penilaian Risiko Bisnis dan HAM) 2.0 yang diluncurkan di Jakarta, Senin, (20/5/2024) merupakan perbaikan dan pembaruan aplikasi bisnis dan HAM Kementerian Hukum dan HAM.

Pembaruan tersebut, menurutnya, seiring dengan adanya beberapa kritik dari pelaku usaha mengenai tampilan dan sistem dari aplikasi PRISMA yang lama.

“Jadi PRISMA 2.0 ini perbaikan agar memudahkan pelaku usaha untuk mengetahui uji tuntas HAM terhadap usahanya,” kata Yasonna saat ditemui usai acara pembukaan Rapat Kerja Program Pemajuan dan Penegakan HAM.

**Baca Juga:[Sajian Nusantara di Jamuan Kenegaraan World Water Forum ke-10](#)

Menkumham menjelaskan PRISMA merupakan aplikasi penilaian mandiri agar suatu perusahaan dapat melihat indikator dalam memenuhi standar HAM. Adapun terdapat 12 indikator yang ada dalam aplikasi tersebut.

Keduabelas indikator dimaksud, yakni yakni kebijakan HAM, mekanisme pengaduan, tenaga kerja, pengaruh HAM pada perusahaan, rantai pasok, kondisi kerja, serikat kerja, privasi, agraria dan masyarakat adat, diskriminasi, lingkungan, serta tanggung jawab sosial perusahaan.

Sejauh ini, Yasonna menuturkan sudah ada beberapa perusahaan yang masuk zona hijau, di mana zona itu menentukan perusahaan tersebut sudah lolos dari kriteria penilaian, salah satunya PT Pertamina (Persero).

“Untungnya Pertamina ini sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah masuk ke zona hijau dan kami apresiasi. Pertamina ini kami dorong terus,” ucap dia.

Kendati demikian, ia menegaskan tak hanya BUMN yang didorong untuk memenuhi persyaratan dalam aplikasi PRISMA 2.0, tetapi juga perusahaan lain melalui berbagai pertemuan sosialisasi maupun edukasi.

Yasonna pun mengimbau agar tak perlu ada ketakutan bagi perusahaan untuk melakukan penilaian mandiri melalui aplikasi PRISMA 2.0 lantaran tidak ada sanksi apabila perusahaan tidak masuk ke zona hijau.

“Dulunya ada ketakutan sanksi, tapi sekarang kami dorong dulu perusahaan-perusahaan itu dengan cara self assesment bagi perusahaan. Kami sediakan aplikasi prisma tadi,” tutur Yasonna.

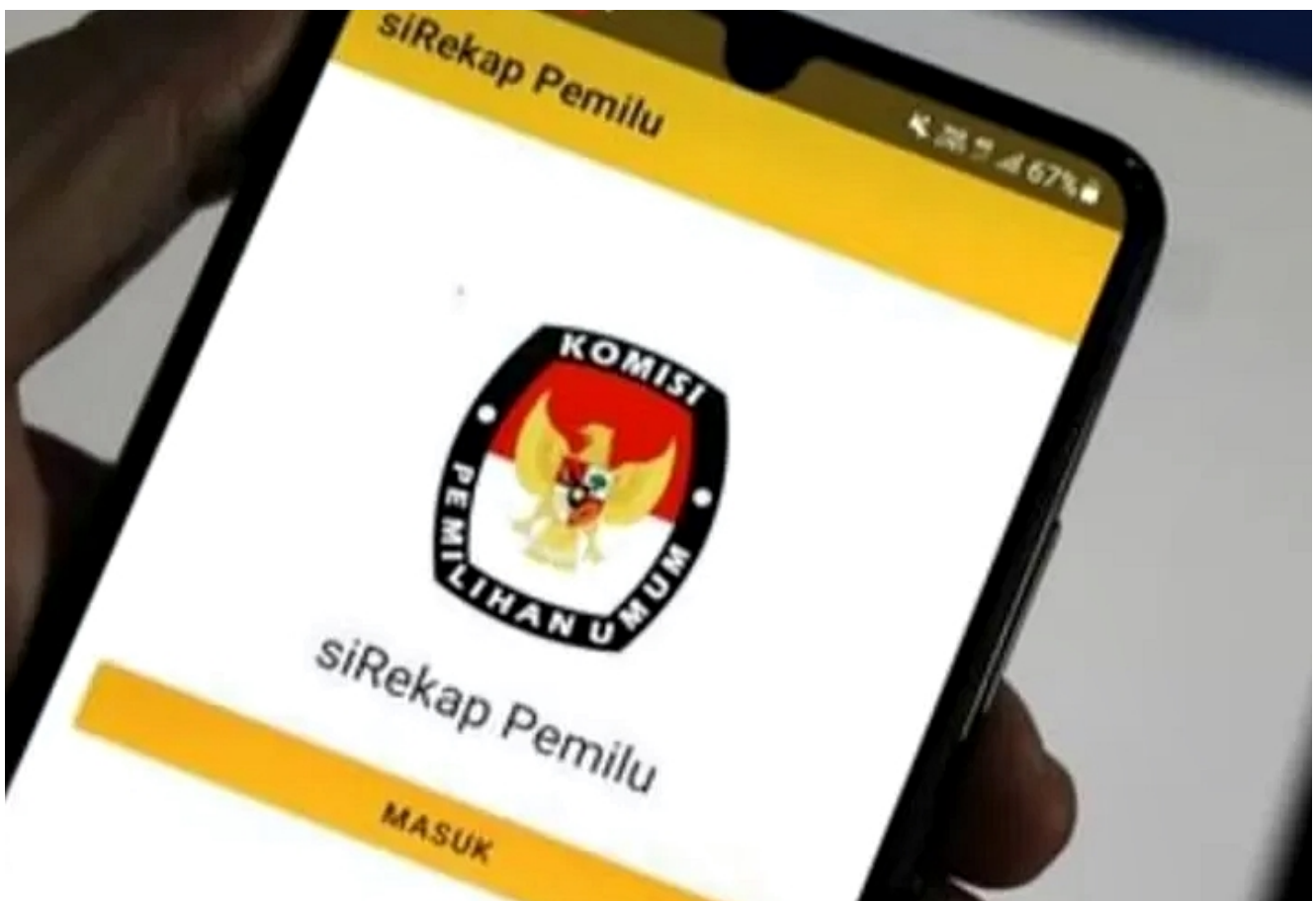
Adapun PRISMA telah dibentuk sejak 2021 untuk memudahkan pelaku usaha di semua sektor usaha dalam melakukan penilaian mandiri dengan menilai kondisi aktual yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko terhadap usahanya.

Aplikasi berbasis situs web itu juga menjadi bagian dari upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM di Tanah Air.(ANTARA)

Berita ini merupakan kerjasama diseminasi LKBN Antara dengan

Begini Sistem Kerja Aplikasi Sirekap KPU yang Ramai Diperbincangkan

written by Editor2 - | 13 Juni 2024



Kabar6-Dalam beberapa hari terakhir, tabulasi suara di aplikasi [Sirekap](#) milik KPU jadi perbincangan masyarakat. Lantaran, jumlah suara dari C Hasil berubah usai diunggah ke aplikasi Sirekap.

[Sirekap](#) sendiri dibuat untuk memudahkan KPU melihat hasil hitung suara Pemilu 2024. Sekaligus bentuk transparansi kepada

masyarakat luas.

Lalu, bagaimanakah sebenarnya aplikasi Sirekap yang diciptakan untuk membantu tugas KPU sekaligus bentuk transparansi itu bekerja?

Akhmad Subagja, Koordiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Banten, menjelaskan bahwa, Sirekap terdiri dari Sirekap Mobile yang dioperasikan petugas KPPS dengan memotret objek C Hasil semua jenis pemilu, kemudian mengirim foto, melakukan pemeriksaan data, kunci dokumen dan berbagai ke saksi maupun pengawas TPS.

Sedangkan Sirekap Web, digunakan saat pleno rekapitulasi berjenjang. Objek foto C Hasil itu kemudian di konversi menjadi tulisan atau angka. Tingkat akurasi tergantung beberapa hal, antara lain penulisan di form C Hasil, teknik pemotretan hingga kondisi pencahayaan.

****Baca Juga: [KPU Banten Hentikan Pleno Tingkat Kecamatan](#)**

“Oleh karena itu, operator Sirekap dalam menggunakan aplikasi [Sirekap](#), sebelum melakukan pengiriman harus melakukan pemeriksaan apakah hasil pembacaan sudah sesuai atau terdapat ketidaksesuaian. Apabila dinyatakan sesuai maka data tersebut akan muncul dalam Info Pemilu untuk kebutuhan publikasi penghitungan suara,” ujar Akhmad Subagja, Koordiv Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Banten, ditulis Senin, (19/02/2024).

Sedangkan rekapitulasi terhadap data yang salah di aplikasi Sirekap, akan dilakukan perbaikan saat rapat pleno di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga RI, secara berjenjang, dengan acuan form C Hasil yang dibacakan saat pleno.

Akhmad Subagja memastikan ke seluruh masyarakat bahwa penetapan suara KPU yang sah hanya melalui rapat pleno yang dilakukan berjenjang, disaksikan oleh peserta pemilu, saksi,

Bawaslu hingga masyarakat.

“Hasil publikasi perolehan suara di Info Pemilu yang berasal dari Sirekap bukan menjadi hasil pemilu, melainkan sebagai upaya bersama dalam menjaga hasil pemilu,” ucapnya.(Dhi)

Perjalanan Riset Aplikasi Teknologi Informatika dan Komputer untuk Pengendalian Pencemaran Lingkungan

written by Editor2 - | 13 Juni 2024



Oleh : Heru Dwi Wahyono, Periset pada Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih – BRIN Mahasiswa S3 Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia

Kabar6-Teknologi informasi dan komputer merupakan bidang keilmuan yang sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan nasional. Bidang ini juga banyak digunakan oleh bidang lain seperti pendidikan, transportasi, kedokteran, industri hingga pertahanan keamanan nasional dan lain-lain. Riset terapan teknologi informasi dan komputer juga dapat digunakan untuk mendukung pengendalian pencemaran lingkungan.

Teori interdisiplin dalam ilmu lingkungan sangat erat kaitannya pada bidang riset terapan ini, karena bidang keilmuan seperti lingkungan, kimia, biologi, fisika instrumen, elektronika, hidrologi, sipil dan lainnya dapat digunakan untuk menghasilkan produk inovasi yang dibutuhkan dalam pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Berikut ini adalah perjalanan riset penerapan teknologi informatika dan komputer untuk pengendalian pencemaran lingkungan yang telah dilakukan oleh penulis sepanjang kurun waktu kurang lebih 30 tahun.

1. Sistem Komputasi Pemodelan Air Tanah

Kegiatan penerapan teknologi informatika dan komputer untuk pengendalian pencemaran lingkungan sudah dirintis sejak tahun 1995 oleh kelompok riset yang berada di bawah Pusat Pengkajian Industri Jasa (PSIJ) Kedeputian Analisa Sistem (AS) – BPPT. Sebagai kegiatan awalnya adalah melaksanakan kegiatan simulasi dan modeling intrusi air laut yang berlokasi di Kota Semarang yang dilaksanakan selama 3 tahun sampai 1998.

****Baca Juga:** [Oknum Kepala Toko Pembobol Alfamart Sentul Ditangkap](#)

Data untuk simulasi yang biasanya diolah menggunakan superkomputer yang dimiliki oleh ITB Bandung, saat itu membutuhkan waktu beberapa jam hingga beberapa hari untuk menyelesaikan proses pembuatan model intrusi air tanah.

Tantangan untuk mempercepat proses pembuatan model sangat diperlukan untuk menghemat waktu dan biaya kegiatan riset. Dengan tantangan untuk mempercepat proses pengolahan data tersebut, maka saat itu data diproses dengan menggunakan workstation yang berada di Universitas Miyazaki di Jepang. Data input diupload menggunakan jaringan internet dan diproses menggunakan program Fortran yang dieksekusi menggunakan komputer dan sistem operasi berkinerja tinggi yang dulu biasa disebut sebagai workstation hanya dalam beberapa menit saja.

Waktu yang singkat ini dapat mempercepat tim peneliti dalam merumuskan rekomendasi kajian intrusi air laut di Kota Semarang. Sehingga kegiatan simulasi dan modeling yang dikerjakan mulai saat itu menggunakan sistem komputer berkinerja tinggi yang disetup di Jakarta. (* / Red)

Selengkapnya terkait opini tersebut silahkan [DOWNLOAD sekarang di link ini !](#)

Pemkab Luncurkan Aplikasi Serang Tatu

written by Editor2 - | 13 Juni 2024



Kabar6-Pemkab Serang melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (DiskominfoSatik) akan meluncurkan aplikasi Serang Terlayani Satu Pintu (Serang Tatu).

Aplikasi ini merupakan integrasi dari semua aplikasi layanan yang ada di Pemkab Serang. Sehingga dapat diakses mudah oleh masyarakat.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, saat pihaknya bertemu dengan Komisi Informasi Pusat, Pemkab Serang disarankan untuk membuat aplikasi yang merangkum semua aplikasi di OPD.

Saat ini, kata Tatu, Diskominfo sedang menyiapkan aplikasi tersebut dan akan diluncurkan pada 8 Oktober 2023. Aplikasi itu akan memuat semua layanan aplikasi di Pemkab Serang.

“Ini sebagai bentuk digitalisasi layanan, sehingga masyarakat tidak bingung dengan banyaknya aplikasi layanan yang ada di Pemkab Serang, jadi semuanya terangkum dalam satu aplikasi,” ujar Tatu di Pendopo Bupati Serang, Selasa (26/9/2023).

Di samping itu, pihaknya juga terus mendorong untuk peningkatan keterbukaan informasi di Pemkab Serang.

****Baca Juga: [TNI AD Panen Semangka](#)**

Dalam pelaksanaannya, pihaknya memerintahkan Sekretaris Daerah untuk memonitoring pejabat pengelola informasi daerah (PPID) supaya lebih maksimal.

“Monitoring itu terus dilakukan secara berjenjang hingga tingkat OPD, kecamatan, sekolah, dan yang lainnya, kemudian juga sarana prasarana apa yang harus ditingkatkan,” ujarnya.

Kepala Diskominfo Kabupaten Serang Haerofiatna menambahkan, aplikasi Serang Tatu akan dibuat seperti platform yang dapat familiar di masyarakat.

Di dalamnya memuat berbagai layanan, mulai dari layanan OPD, radio, marketplace, dan layanan lainnya.

Ia menjelaskan, aplikasi ini sementara akan mencakup sembilan

OPD yang melakukan pelayanan secara tematik. Seperti Disdukcapil, Bapenda, DPMPTSP, dan OPD yang lainnya.

“Jadi semua pelayanan di OPD akan terintegrasi satu pintu melalui aplikasi ini,” pungkasnya.(Aep)

Momen HKG PKK Ke-51, Kota Tangerang Luncurkan Aplikasi E-Dasawisma

written by Editor2 - | 13 Juni 2024



Kabar6-Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) ke-51 tahun tingkat Kota Tangerang yang diramaikan oleh seluruh anggota PKK se-Kota Tangerang serta masyarakat Kota Tangerang, begitu meriah saat digelar di kawasan Tugu Adipura Kota

Tangerang, Minggu, (2/7/2023).

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh anggota TP PKK Kota Tangerang atas segala kerja kolaboratif PKK bersama dengan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

“Peran PKK sangat penting, terlebih peran seorang ibu yang menjadi motor penggerak ditengah keluarga, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas keluarga di masyarakat,” ungkapnya.

****Baca Juga: [Motor Warga Depok Hilang, Ketemu di Pamulang Dipakai Komplotan Pejambret](#)**

Selain itu, pada kesempatan ini juga diluncurkan Aplikasi E-Dasawisma yang merupakan sistem informasi digital sebagai upaya peningkatan pengelolaan dan sistem informasi anggota PKK yang semakin optimal.

“Saya berharap dukungan serta kerjasama ini akan terus menjadi semangat kita bersama untuk mewujudkan keluarga Kota Tangerang yang semakin maju dan sejahtera. Apalagi udah ada aplikasinya nih, harus makin semangat kerjanya,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, dimeriahkan pula dengan kegiatan senam bersama, bazar UMKM, doorprize serta pembagian hadiah lomba 10 Program PKK yang diraih oleh Kecamatan Cibodas sebagai Juara Umum. (Oke)

Usai Libur Lebaran, Warga

Pendatang di Tangsel Wajib Daftar ke Aplikasi Sipermen

written by Editor2 - | 13 Juni 2024



Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie mengatakan, usai libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pelayanan publik kembali normal. Pemerintah sebelumnya menetapkan bahwa waitu cuti bersama Lebaran pada 19-25 April 2023.

“Khususnya pelayanan publik yang paling mendasar ya. Artinya, sekarang sudah harus normal lagi seperti semula,” katanya di Puspemkot Tangsel, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, Rabu (26/4/2023).

Benyamin juga mengimbau kepada warga urban yang mudik Lebaran saat arus balik. Masyarakat tidak berbondong-bondong membawa sanak keluarga atau kerabat untuk mengadu nasib di Kota Tangsel.

Kecuali, menurutnya, warga pendatang tersebut sudah punya keahlian khusus dan siap tetap di industri yang membuka lowongan pekerjaan. “Jangan sampai kedatangan warga urban pascalebaran justru menimbulkan masalah sosial baru,” tegas Benyamin.



Kemendagri gelar kampanye KTP digital perdana di Kota Tangsel. (yud)

Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel, Dedi Budiawan mengingatkan, bagi para pendatang baru yang datang untuk berbagai keperluan segera mendaftarkan diri ke aplikasi sistem pendaftaran penduduk non permanen (Sipermen) yang ada di web <https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>.

****Baca Juga: [Makna Idul Fitri, Wali Kota Tangsel: Bangun Suasana Damai, Tenteram, Teduh dan Kondusif](#)**

“Semoga saja himbuan kami bisa diteruskan oleh para camat dan lurah,” ungkapnya. Ia memastikan, pemerintah daerah tidak akan melakukan operasi yustisi kependudukan usai musim mudik libur Lebaran di Kota Tangsel.

“Pertama karena kejaksan tidak lagi berkenan secara aturan untuk tindak pidana ringan,” jelas Dedi.

Ia bilang, operasi yustisi kependudukan yang beberapa tahun lalu digelar kurang efektif. Apalagi pelaksanaan kegiatan tersebut membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit.

Makanya, lanjut Dedi, operasi kependudukan di pemukiman warga ditiadakan. “Tidak ada lagi pendataan door to door, karena

tidak efektif butuh anggaran besar untuk honorarium tim,” tegasnya.(Adv)

Jika Kamu Lupa EFIN Bisa Lewat M-Pajak

written by Editor2 - | 13 Juni 2024

Lupa EFIN

Silahkan isi data dibawah ini agar Anda kembali mendapatkan EFIN Anda.

NPWP *

Hanya angka, tanpa tanda titik (.) dan strip (-).

NIK *

Selanjutnya



Kabar6-Fitur terbaru aplikasi mobil penyedia layanan perpajakan M-Pajak, baru saja diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fitur baru tersebut yaitu layanan lupa *electronic filling identification number* (EFIN).

“Sejak Selasa, 14 Maret 2023, DJP telah menambahkan fitur mendapatkan EFIN dalam aplikasi M-Pajak. Penambahan ini semata untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangannya, Senin (20/03/2023).

EFIN adalah 10 digit nomor identifikasi yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak. EFIN berfungsi sebagai identitas wajib pajak pada saat melakukan transaksi elektronik dengan DJP untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sifat EFIN ini sangat rahasia dan digunakan sebagai alat autentikasi.

“Masalah yang paling sering terjadi saat masa pelaporan SPT Tahunan adalah lupa kata sandi (*password*) e-filing. Untuk mengatur ulang kata sandi yang lupa itu, membutuhkan EFIN. Sayangnya, wajib pajak juga seringkali lupa EFIN. Oleh sebab itu, layanan lupa EFIN terus kami permudah dengan tetap menjaga sifat kerahasiaannya,” ucap Dwi.

Langkah-langkah penggunaan layanan lupa EFIN di M-Pajak adalah sebagai berikut.

Persiapan

Pastikan wajib pajak sudah cek di *inbox* surel, jika ada kemungkinan EFIN masih tersimpan di surel. Jika memang tidak ditemukan, wajib pajak dapat memanfaatkan layanan lupa EFIN dengan langkah-langkah persiapan berikut.

- Pastikan bahwa perangkat wajib pajak:
 1. memiliki kamera yang berfungsi dengan baik,
 2. telah terinstalasi aplikasi M-Pajak versi terbaru, dan
 3. terkoneksi

- Pastikan bahwa wajib pajak dapat mengakses surel yang telah terdaftar di DJP.
- Direkomendasikan agar perangkat wajib pajak menggunakan nomor ponsel wajib pajak yang telah terdaftar di DJP dan memiliki pulsa yang cukup untuk pengiriman
- Direkomendasikan agar wajib pajak berada di tempat yang terang untuk pengambilan foto
- Persiapkan data-data berikut:

1. NPWP,
2. NIK,
3. Nama (sesuai KTP),
4. Tempat lahir,
5. Tanggal lahir, dan
6. Alamat tempat

****Baca Juga:** [DJP Banten Bantu Warga Operasi Katarak Gratis](#)

Pelaksanaan

- Buka aplikasi M-Pajak.
- Tekan tombol EFIN di tampilan *Home* (bisa tanpa login).
- Masukkan data yang diminta dalam aplikasi M-Pajak. Data diisi dengan Hindari kesalahan pengetikan karena itu menyebabkan kegagalan verifikasi.
- Ikuti instruksi pengambilan foto
- Konfirmasi data wajib
- Jika foto diri wajib pajak berhasil divalidasi, sistem akan mengirimkan EFIN ke surel wajib pajak yang telah terdaftar di DJP. Setelah mendapatkan EFIN di surel, wajib pajak dapat mengakhiri proses ini dan melanjutkan ke proses Lupa Kata
- Jika validasi foto diri tidak tersedia, sistem akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor ponsel wajib pajak yang telah terdaftar di
- Masukkan kode verifikasi.
- Jika kode verifikasi sesuai, sistem akan akan mengirimkan EFIN ke surel wajib pajak yang telah

terdaftar di DJP. Setelah mendapatkan EFIN di surel, wajib pajak dapat mengakhiri proses ini dan melanjutkan ke proses Lupa Kata

Selain layanan lupa EFIN yang ada di aplikasi M-Pajak, kanal layanan lupa EFIN yang selama ini telah ada tetap dapat digunakan. Kanal layanan tersebut antara lain telepon, surel, *direct message*, atau datang langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Nomor telepon, alamat surel, dan alamat KPP bisa dicek di <https://pajak.go.id/unit-kerja>.

“Mudah. Karenanya mari segera laporkan SPT Tahunan Anda hari ini lewat e-filing. Lebih awal lebih nyaman,” pungkas Dwi. (Red)

Pesan Makin Praktis Lewat Aplikasi TwoSpaces

written by Editor2 - | 13 Juni 2024



Kabar6-TwoSpaces Group bekerja sama dengan NEC Indonesia meluncurkan fitur smart check in dan smart concierge sebagai bagian dari konsep smart living. TwoSpaces Group sebuah startup hospitality yang fokus pada solusi untuk sewa menyewa kamar hunian dan ruang kerja.

“Kita sudah membantu 99 properti dengan 39 ribu member produk kita coworking dan living,” kata pendiri TwoSpaces, Ronni Sofrani di kawasan BSD, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dikutip Sabtu (18/3/2023).

Ia terangkan, fitur smart check in ini adalah fitur di mana Tami hotel dapat melakukan proses check in secara digital dan contactless. Fitur ini juga memungkinkan tamu melakukan self check in sebelum tiba di hotel layaknya proses web check in yang telah lama hadir di dunia penerbangan.

Ronni pastikan dengan fitur ini para pemilik dan operator hotel dapat meminimalisir karyawan yang menangani check in untuk dapat dialokasikan ke fungsi lainnya. Membuat check in proses menjadi lebih accountable, dan juga mengurangi antrian

kedatangan serta waiting time untuk tamu.

“Cara daftar melalui aplikasi twospaces, verifikasi melalui digital dengan teknologi NEC Indonesia. Semua bisa dilakukan sendiri, tanpa perlu bantuan dari dengan orang lain,” terangnya.

Di lokasi yang sama, Presiden Direktur NEC Indonesia, Joji Yamamoto mengungkapkan, fitur smart concierge adalah fitur pembelian dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari. Seperti makanan, minuman, laundry, coworking dan lainnya.

**Baca Juga: [Polisi Bekuk Tiga Orang Adakan Perkatik Galian Tanah Ilegal di Sukamulya](#)

“Fitur ini membantu penggunaan poin loyalty untuk transaksi tersebut menggunakan verifikasi biometric wajah. Kedua fitur ini ditawarkan dengan biaya yang terjangkau dan skema subscription yang fleksibel,” ungkapnya.

Ia menambahkan, teknologi pengenalan wajah NEC yang berakurasi tinggi mendukung proses verifikasi calon penyewa untuk meminimalisir resiko pemilik unit dan penghuni lainnya terhadap penyewa yang punya rekam jejak buruk. Bahkan pernah melakukan tindak kriminal sebelumnya.

“Dengan menggabungkan teknologi pengenalan wajah kelas dunia NEC dengan aplikasi TwoSpaces yang inovatif, kami ingin menciptakan pengalaman baru yang mudah, aman, fleksibel dalam konsep kehidupan yang cerdas dan terintegrasi,” tambah Yamamoto.(yud)